

## STRATEGI KEBANGKITAN EKONOMI TIONGKOK DAN PENDEKATAN *LONG CYCLE* TRANSISI KEKUASAAN POLITIK DUNIA

<sup>1</sup>Yoga Suharman dan <sup>2</sup>Sugiarto Pramono

<sup>1</sup>Dosen pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Sosial,  
Universitas AMIKOM Yogyakarta. Email: yoga.shrmn@amikom.ac.id;

<sup>2</sup>Dosen pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Wahid Hasyim. Email: sugiartopramono@unwahas.ac.id

### **Abstract**

*The rise of China reflects the reality of international politics today. Even though its emergence has only been sequenced since at least the economic reforms in 1987, the commitment of the Chinese nation was able to bring it to its position as a dynamist and shaping the global political economy order. Economic leaps, technology, research, and even the military outperformed many European countries and is even said to have matched the United States. How the economic strategy and the implications of China's rise to global politics are the focus of the study in this paper. In order to answer this question, the author examines the approach of capitalism with Chinese characteristics and long cycle in world politics using qualitative methods that utilize interpretive analysis techniques and literature review. Based on the authors argue that China's economic revival cannot be separated from the international trade strategy and financial policies adopted by the country. Meanwhile, China's rise sparked a reaction from the guarantor of hegemonic stability, namely the United States. The dynamics of the relationship between the two major countries is still the center of debate in the study of the global political economy today.*

**Keywords:** long cycle, world politics, financial strategy, the shifting power, power shifting.

### **Abstrak**

*The rise of China merefleksikan realitas politik internasional dewasa ini. Walaupun kemunculannya baru dapat diruntut setidaknya sejak reformasi ekonomi pada tahun 1987, namun komitmen bangsa China mampu mengantarkan pada posisi sebagai dinamisator dan pembentuk tatanan ekonomi politik global. Lompatan ekonomi, teknologi, riset bahkan hingga militer mengungguli banyak negara-negara Eropa bahkan disebut telah menyamai Amerika Serikat. Bagaimana strategi ekonomi dan implikasi kebangkitan Tiongkok terhadap politik global menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. Guna menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengkaji dengan pendekatan capitalism with Chinese characteristic dan long cycle in world politics menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan teknik analisis interpretatif dan kajian literatur. Berdasarkan penulis berargumen bahwa kebangkitan ekonomi Tiongkok tidak dapat dipisahkan dari strategi perdagangan internasional dan kebijakan finansial yang ditempuh oleh negara tersebut. Sementara, kebangkitan Tiongkok memicu reaksi dari penjamin stabilitas hegemonik, yakni Amerika Serikat. Dinamika hubungan dua negara besar tersebut masih menjadi sentral perdebatan dalam studi ekonomi politik global saat ini.*

**Kata Kunci:** long cycle, world politics, strategi finansial, pergeseran kekuasaan.

## A. PENDAHULUAN

Negara China telah dipandang sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Ekspansi ekonomi China disejumlah kawasan melalui agenda kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) menunjukkan bahwa negara itu mulai bergerak sebagai kekuatan baru (*new emerging power*) dan sekaligus menegaskan kebangkitan dalam kontestasi ekonomi politik global. Kebangkitan itu setidaknya dapat ditunjukkan dengan tiga faktor. Pertama, menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dengan nilai mencapai \$US 14 triliun. Kedua, negara dengan GDP tertinggi (IMF, 2018). Ketiga, China merupakan eksportir terbesar dengan pencapaian hingga \$US 2.26 miliar. Tingginya pendapatan China itu dinilai juga turut mendorong pergerakan ekonomi dunia (World Bank, 2018).

Jika dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya, kebangkitan China mengubah status negara tersebut sebagai penerima donor menjadi negara pendonor (Hungerland, 2018). Perubahan itu juga sekaligus menyaingi posisi Amerika Serikat sebagai penjamin stabilitas hegemonik dalam politik global setelah Perang Dunia II. Kondisi ini digambarkan oleh Ikenberry dan Lim menyebutnya sebagai bentuk pencarian otoritas dan menantang stabilitas hegemoni Amerika Serikat dalam kontestasi ekonomi politik global (Ikenberry dan Lim 2017, 7-8 dikutip Hungerland, 2018). Sejak reorientasi kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) yang diiniasi oleh Deng Xiaoping, China mulai memberikan kesempatan masuknya agenda liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi.

Reorientasi kebijakan ekonomi China dipengaruhi kuat oleh komitmen para pembuat kebijakan ditingkat pusat pemerintahan (Garret, 2014, pp. 411-425). Komitmen itu dapat ditunjukkan dari dua faktor. Pertama, pemerintahan China menilai bahwa globalisasi merupakan fenomena ekonomi yang membuka peluang untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Kedua, globalisasi dapat

dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi China untuk mengintegrasikan diri ke dalam organisasi internasional seperti, *World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia (*World Bank*) serta ke dalam kelompok negara-negara G7, G8 dan G-20 (Yafei, 2017).

Proses kebangkitan China selama lebih dari dua dekade terakhir dapat dikatakan berlangsung cukup dramatis. Diawali dari reformasi 1978, mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, membuka diri terhadap liberalisasi ekonomi, merumuskan jalur kerjasama melalui BRI sampai dengan terjadinya peristiwa perang dagang dengan Amerika Serikat. Melalui sejumlah parameter yang meliputi ekonomi, teknologi, militer, dan ilmu pengetahuan membuat posisi China semakin disejajarkan dengan Amerika Serikat. Kebangkitan dramatis tersebut menarik untuk dikaji. Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana strategi ekonomi dan implikasi kebangkitan Tiongkok terhadap transisi kekuasaan politik global?

### **Kerangka Konseptual**

Guna menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan kerangka konsep *capitalism with Chinese characteristic* dan *long cycle in world politics*. Konsep pertama digunakan untuk membaca strategi ekonomi Tiongkok dan yang kedua sebagai perangkat analisis transisi kekuasaan dalam politik global.

#### *Capitalism with Chinese Characteristic*

Strategi kebangkitan ekonomi China sebagai kekuatan baru tidak dapat dipisahkan dari model *capitalism with Chinese characteristic*. Kebangkitan ekonomi China pada kenyataannya tidak terlepas dari bentuk-bentuk akumulasi modal yang terbilang unik. Strategi ekonomi pasar Tiongkok dibangun oleh negara yang berasosiasi dengan model kapitalisme. Negara memainkan peran untuk menstabilkan dan melegitimasi pengaturan kelembagaan secara ketat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Weil (1996), bahwa negara

mengendalikan secara penuh mekanisme dan sistem ekonomi nasional (Weil, 1996, 11-14). Kapitalisme China dicirikan dengan kebijakan negara yang oportunistis dan hubungan yang bersifat partikularistik.

Kendali pemerintah dalam mengelola dinamika pasar bebas antara lain ditunjukkan dalam menentukan kuota produksi, tingkat distribusi, harga dan kontrol terhadap aset nasional. Walden Bello (2019) merumuskan empat karakteristik mendasar dalam strategi ekonomi politik Cina kontemporer, antara lain, pembangunan berbasis pasar, privatisasi berbagai sektor industri tetapi dengan intervensi negara pada sektor-sektor strategis, produksi berorientasi ekspor yang ditopang oleh represi finansial, desentralisasi kebijakan ekonomi pada otoritas lokal sementara otoritas pusat mengendalikan kebijakan makroekonomi yang bersifat strategis (Bello, 2019). Meskipun China dinilai masih sebagai negara yang identik dengan basis komunisme dan sosialisme yang kental, tetapi dalam urusan ekonomi, negara itu mempunyai tradisi pragmatisme ekonomi yang cukup kuat. Negara menetapkan regulasi kepada pemodal perorangan hingga perusahaan multinasional mencerminkan kuatnya peran negara untuk menentukan arah kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional.

*Pendekatan Long Cycle in World Politics*

George Modelski dalam *magnum opus*-nya *Long Cycles in World Politics* (1987) menjelaskan proses pergantian dari satu *super power* ke *super power* lain. Menariknya proses pergantian kekuasaan global tersebut selalu diselingi dengan perang besar dalam siklus 100 tahunan. Modelski menerangkan bahwa suatu *super power* (negara yang sangat kuat mengungguli kekuatan negara lain, baik secara militer, ekonomi, pengetahuan maupun berbagai sumber daya lainnya) akan selalu melahirkan para penantang (*challengers*) dari negara *middle power* yang secara alamiah selalu berjuang untuk mencapai keunggulan (Modelski, 1987). Di sisi lain *super power* lama selalu bertahan hingga akhirnya runtuh dan terganti oleh *super power* baru. Celakanya rekaman sejarah menunjukkan bahwa dalam proses pergeseran tersebut selalu diselingi oleh perang besar.

Tunjuk saja pergantian *super power* dari Portugal ke Netherland ( $\pm 1600$ ), dari Netherland ke Britain I ( $\pm 1700$ ) kemudian ke Britain II ( $\pm 1800$ ), lalu ke AS (1914).

Berdasarkan sudut pandang Modelski, kebangkitan China mengafirmasi pendekatan *long cycles in world politics*. Perjalanan sejarah hegemoni Amerika Serikat pada gilirannya akan melahirkan para penentang. Dalam konteks ini China dapat diletakkan sebagai negara penentang. Tidak mengherankan pula bila kebangkitan Tiongkok mengundang reaksi Amerika Serikat. Gagasan Modelski ini tentu tidak luput dari kritik ketika digunakan untuk menganalisis fenomena kebangkitan China. Para pengkritik Modelski menganggap bahwa gagasan *long cycle in world politics* tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kebangkitan China yang selama ini dinilai berlangsung secara damai. Tidak sedikit para sarjana seperti saja Zhang, Y. (2016), Kai (2015) hingga Boswell, T. (1995) yang menentang gagasan Modelski. Ketiga ilmuwan tersebut mengkritik bahwa China bangkit secara damai dan tidak serta merta menentang hegemoni Amerika Serikat dan tidak terbukti adanya peperangan besar antara *superpower*.

Sejumlah fakta kebangkitan China seperti ekspansi ekonomi dan distribusi modal melalui BRI ke sejumlah kawasan dunia yang disertai dengan meningkatnya interaksi ekonomi China dengan dunia terutama sering ditunjuk sebagai legitimasi argumen itu. Gagasan Modelski tampak relevan dalam membaca siklus kebangkitan negara *superpower* pada basis perang konvensional yang mengutamakan militer ataupun peperangan besar, namun penting juga dicatat bahwa karakter perang dalam politik global kontemporer telah mengalami perubahan. Fenomena perang dagang antara Amerika Serikat vs China misalnya, merefleksikan rivalitas ekonomi sebagai basis argumentasi yang bisa mendorong terjadinya perang antarnegara serta transisi kekuatan dalam struktur ekonomi politik global. Pola sejarah yang berlangsung dalam perubahan ekonomi dunia merupakan kekuatan pendorong dibalik perubahan politik dalam sistem internasional. Jika suatu perekonomian negara tumbuh jauh lebih cepat melampaui negara-negara lain, maka hal ini merupakan indikasi kebangkitan kekuatan global yang baru (Choi, 2018).

*Long cycle in world politics* menggambarkan hubungan antara perang, supremasi ekonomi, dan aspek politik kepemimpinan dunia. Seperti yang dijelaskan Flint, gagasan Modelski berguna untuk membaca proyeksi perubahan struktur geopolitik internasional. Lebih lanjut, Flint menyatakan bahwa, keputusan geopolitik dibuat dengan memperhatikan konteks geopolitik global, dan terutama kemampuan kekuatan dominan untuk menetapkan agenda internasional (Flint, 2006, p. 218)". Salah satu kemampuan kekuatan dominan itu dicirikan dengan periode transformasi sosial dan pertumbuhan ekonomi yang ekstensif (Pop & Grigoras, 2018). Transformasi ini melalui fase-fase tertentu, (1) perang dunia – suatu interval yang menandai pergantian siklus; (2) kekuatan dunia - periode waktu ketika kekuatan hegemonik diakui sebagai kekuatan global dan memaksakan perannya dalam mengatur sistem global, (3) Delegitimasi - periode waktu ketika terjadi erosi kepemimpinan global dan perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah baru, dan (4) dekonsentrasi - periode waktu ketika kekuatan pemimpin global mencapai level terendahnya, muncul kekuatan baru yang dapat membahayakan status pemimpin global terdahulu (Pop & Brânză, 2017).

Pada sisi lain, ada kecenderungan konfrontasi yang ditimbulkan oleh dua negara besar antara Amerika Serikat dan China, yakni kemungkinan eskalasi ketegangan militer yang terkait dengan status Taiwan atau sengketa teritorial atas pulau-pulau di laut China selatan dan pulau Senkaku / Diaoyu, baik secara langsung atau melalui perang *proxy* (Pop & Brânză, 2017). Kebangkitan China dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir mencirikan adanya sebuah transisi kekuasaan dalam kepemimpinan global sebagaimana dalam gagasan *long cycle in world politics*. Meski pemikiran Modelski banyak dinilai sebagai salah satu gagasan proyeksi tentang politik dunia, namun hal ini menjadi penting untuk membaca pola dinamika sejarah kebangkitan kekuatan baru dan transisi kepemimpinan politik dunia dalam sistem internasional serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan berulangnya pola sejarah perang dunia.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini relevan dengan pertanyaan riset: *bagaimana strategi ekonomi dan implikasi kebangkitan Tiongkok terhadap politik global?* yang membutuhkan eksplorasi terhadap data baik yang berupa narasi maupun angka. Metode kualitatif merupakan “upaya untuk menafsirkan fenomena dengan menghadirkan analisis interpretatif” (Greenhalgh, T. and Rod Taylor, 1997) untuk mengungkap realitas. Di saat yang sama ciri “fleksibilitas dan kepekaan terhadap konteks” dari metode ini (Mason, 2002) menjadikan metode ini memiliki ketajaman untuk membongkar lebih komperhensif permasalahan yang diteliti.

Secara lebih spesifik teknik penelitian yang dipakai adalah studi literatur dan analisis interpretatif terhadap berbagai macam sumber data yang diperoleh. Studi literatur terutama digunakan untuk memetakan akumulasi pengetahuan yang didapat para peneliti sebelumnya. Dengan demikian capaian pengetahuan sebelumnya terkait dengan topik yang sedang diteliti dapat diketahui dengan baik. Sehingga penelitian yang dilakukan ini memiliki dasar pengetahuan yang kokoh. Struktur berfikir seperti ini penting karena dengan mengetahui perdebatan yang telah berlangsung tentang topik terkait dapat menuntun peneliti untuk mengeksplorasi ruang-ruang baru yang belum atau setidaknya kurang mendapat perhatian dari para peneliti sebelumnya. Cara membangun argumentasi ini membuat riset memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Atas dasar itu, “serpihan” data yang dikumpulkan dianalisa dan dikonstruksi secara argumentatif untuk menjawab pertanyaan riset.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perdagangan Internasional China**

Setelah pencapaian di WTO pada tahun 2001, Cina mulai aktif untuk menginisiasi kesepakatan perdagangan regional (*Regional Trade Arrangements*). Cina menganggap bahwa perdagangan kawasan menjadi prioritas dalam perluasan distribusi ekspor produk

dalam negeri. Hal ini setidaknya diwujudkan dalam empat bentuk kerjasama dengan kawasan di luar Asia Timur, seperti China-ASEAN, China-Pakistan, China-Chile dan China-Selandia Baru. Peningkatan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara-negara luar kawasan membuat China menikmati buah manis liberalisasi ekonomi global. Melalui *Belt and Road Initiative*, China relatif berhasil mengembangkan pertalian dagang dan memperluas wilayah ekspansi ekonomi.

Jauh sebelum memasuki fase reformasi ekonomi, Cina dikenal sebagai negara sosialis dan juga proteksionis. Namun, sejak tahun 1991, *Chinese Communist Party* (CCP) memperkenalkan sebuah konsep *the socialist market system with Chinese characteristic*". Sejak saat ini pula Cina mulai merancang perubahan kebijakan ekonomi secara radikal dalam sektor finansial, perbankan, perpajakan, perdagangan, *state-owned enterprise*, perburuhan dan pengelolaan administrasi pemerintahan. Reformasi ekonomi Cina mengawali negara ini sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia Timur selain Jepang.

Sebagai negara yang menerapkan kebijakan terbuka (*open-door policy*), pertumbuhan rata-rata GDP Cina sejak 30 tahun terakhir hampir mendekati angka 10%. Angka ekspor produk-produk yang dicapai Cina menjadikan negara ini sebagai negara manufaktur dan eksportir terbesar dunia (Seung-soo, 2016). Liberalisasi ekonomi Cina ditempuh dengan perluasan partisipasi di tingkat WTO dan regional seperti, kesepakatan perdagangan regional (*Regional Trade Agreements*), *Trans Pacific Partnership* (TPP) dan *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP). Reformasi kebijakan ekonomi Cina berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam negeri.

Sejak tahun 2000, Cina telah meningkatkan target ekspor dunia sebesar sebesar 6.1% mendekati angka yang dicapai oleh Amerika Serikat, Jerman dan Jepang (Landsberg & Burkett, 2006, 20). Pangsa pasar ekspor produk perdagangan Cina di tingkat dunia terus meningkat hingga 10% pada tahun 2010 dan telah mencapai 11% pada 2013. China juga merupakan negara terbesar kedua dalam hal impor bahan produksi yang mencapai 10,32% impor dunia pada tahun 2013 (Li, Qiu, Xue, 2016: 410). Capaian ini diperoleh setelah



pemerintah Cina mulai menurunkan hambatan tarif dan non-tarif sesuai dengan komitmen terhadap Konsensus Washington (Washington Consensus) pada tahun 2001.

Keterlibatan Cina dengan organisasi perdagangan internasional (WTO) yang dimulai secara resmi pada tahun 2001 setidaknya memengaruhi intervensi negara terhadap pasar. Meski demikian, pemerintah Cina masih tetap memegang kendali terhadap stabilitas dan transparansi serta menyediakan informasi-informasi penting dalam perdagangan ekspor maupun impor sekaligus tetap mempertahankan sektor strategis nasional.

Dalam melaksanakan komitmen dengan WTO, pemerintah Cina menurunkan hambatan non-tarif dengan menetapkan semua batas tarif rata-rata dari angka 15,6% di tahun 2001 menjadi 9,7% di tahun 2005, tarif barang manufaktur turun dari 14,3% menjadi 8,9%, dan produk pertanian menurun dari 23,2% menjadi 14.6% pada tahun yang sama (Bin, 2015: 6). Sementara, reduksi hambatan tarif perdagangan Cina diturunkan dari angka 42 persen menuju 15.3 persen (Zhang, 2010, 180).

Penurunan hambatan tarif dan non-tarif ini berdampak pada peningkatan investasi luar negeri. Meskipun ada pandangan yang menilai bahwa Cina berupaya meningkatkan surplus produksi, namun ada dua hal yang penting dicatat. Pertama, produksi manufaktur Cina tidak diarahkan pada pencapaian surplus barang tetapi justru fokus pada kompetisi nilai produk dalam bidang ekspor yang dimulai menekan biaya produksi sampai dengan distribusi. Kedua, pengurangan hambatan non-tarif mendorong investor luar negeri untuk memperluas aliran modalnya ke negara Cina. Sebagaimana yang dijalankan oleh negara-negara lain di Asia Timur, Cina juga mengurangi distorsi terhadap industri dan harga komoditas produksi untuk mencapai keunggulan komparatif dalam segi harga pasar. Sebagai catatan tambahan, meskipun beberapa pandangan menyatakan bahwa dominasi pasar bisa melemahkan peran negara, namun China dinilai mampu mengkalkulasi pada sektor apa peran negara dapat diminimalisir dan mana yang memerlukan intervensi strategis negara.

### Strategi *Belt and Road Initiative*

BRI dideklarasikan oleh Xi Jinping pada saat meresmikan Forum Boao untuk Konferensi Tahunan Asia di Hainan pada tanggal 28 Maret 2015\_(Banerjee, Dipankar 2016, 2). Xi Jinping adalah salah satu tokoh kunci di balik kebangkitan China kontemporer. Posisinya dalam pemerintahan sangat kuat. Selain sebagai Presiden China sejak 2013, ia juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT), Kepala Komisi Militer Sentral Republik Rakyat Tiongkok, Sekretaris Jenderal Komite Tetap Politburo PKT. Serangkaian jabatan sangat penting itu memungkinkan Xi memiliki otoritas sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan China.

Sejumlah catatan menarik perlu dikemukakan: *Pertama*, kebijakan BRI sejatinya merupakan bagian dari implementasi visi kebangkitan Tiongkok (*the Rise of China*) nya Presiden Xi yang tidak lepas dari cita-cita para pemimpin terdahulu. Sun Yatsen, pada masa perjuangan Revolusi Tiongkok 1911, memiliki slogan *Zhenxing Zhonghua* atau bermakna kebangkitan bangsa Tionghoa. Kemudian dilanjutkan oleh Deng Xiaoping, dengan “penyegaran kembali Tiongkok” awal tahun 1980an. Konsep kebangkitan masih digunakan Jiang Zemin dan Hu Jintao yang mengutamakan tujuan kebangkitan Tiongkok secara nasional dan standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat pada tingkat individu. Konsep yang sama dimodifikasi oleh Xi Jinping yang melahirkan kebijakan BRI (Nufus, Hayati, 2014, 47-48). BRI juga merupakan pintu ekspansi China untuk “memaksakan” perannya dalam globalisasi dan tata kelola ekonomi global.

*Kedua*, dalam sistem pemerintahan Tiongkok, PKT memiliki peran sentral. BRI yang merupakan inisiasi Xi sebagai Sekretaris Jenderal Komite Tetap Politburo PKT didukung penuh oleh PKT. Bahkan PKT mengabadikan pemikiran politik Xi Jinping ke dalam konstitusi partai (DW: “Xi Jinping, Idola Baru Partai Komunis Cina,” DW, 24 Oktober 2017). Sehingga bisa dikatakan bahwa BRI adalah program Partai. Karena BRI

merupakan program Partai maka bersifat permanen, walaupun Jabatan Xi berakhir sebagai Presiden namun kebijakan BRI terus berlangsung.

Kebijakan BRI memiliki sejumlah ciri menarik: *pertama*, memiliki akar sejarah yang sangat panjang di masa lalu dan berjangkauan jauh ke depan. Sejarah kebesaran Jalur Sutera telah menginspirasi sudut pandang Tiongkok modern dalam melihat dirinya dan dunia. *Kedua*, melibatkan banyak *stakeholder* di berbagai sektor dan berbagai tingkat. BRI tidak hanya melibatkan mitra yang berupa negara-negara di kawasan Asia, Eropa dan Afrika namun juga lembaga multilateral (AIIB, ADB dst.) serta keterlibatan warga negara secara luas termasuk bermacam perusahaan, Perguruan Tinggi dan berbagai lembaga riset, Tiongkok misalnya memberikan *BRI Scholarship* pada mahasiswa asing.

*Ketiga*, integratif dan saling menguatkan. Kebanggaan terhadap kebesaran Tiongkok menginspirasi para *stakeholder* untuk bersinergi dalam sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan. Dokumen resmi “*Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road*” menyebut sejumlah tujuan BRI, yaitu: (1) mempromosikan liberalisasi dan integrasi terhadap ekonomi pasar dan efisiensi tinggi atas alokasi sumber daya; (2) Penguatan koordinasi kebijakan ekonomi diantara negara terkait secara kolektif dan meningkatkan kerjasama regional dengan standar yang optimal; dan (3) menciptakan arsitektur kerjasama ekonomi regional yang terbuka, inklusif, dan setara yang saling menguntungkan (Fung Business Intelligence Centre, 2015, 2).

*Keempat*, sangat operasional sehingga realistis untuk dilakukan. Dalam rangka membangun konektivitas Asia, Eropa dan Afrika secara infrastruktur sejumlah proyek sedang dilakukan baik berupa pembangunan *high way*, jalur kereta api, pelabuhan, bandara dan aneka instrument konektivitas lain yang diharapkan aneka implikasi ekonomi, sosial dan budaya akan tumbuh mengikutinya. Karena meliputi area darat dan laut maka secara operasional BRI memiliki dua cabang besar, yaitu: (1) *the Silk Road Economic Belt* (SREB) atau Sabuk Ekonomi Jalan Sutera, adalah jalur yang menjadi “*Eurasian land*

*bridge*” atau jembatan darat Eurasia menghubungkan Tiongkok melalui jalan darat menuju ke Rotterdam (*Western Europe*); (2) *the 21st-Century Maritime Silk Road* (MSR) atau Jalur Sutera Maritime Abad ke-21 yaitu jalur sutera modern melalui rute laut dari pesisir Tiongkok timur, Laut Tiongkok Selatan, Samudera Hindia sampai menyentuh Eropa.

Dua cabang besar rute tersebut kemudian dipecah-pecah lagi menjadi 6 koridor, yaitu: (1) *New Eurasian Land Bridge* yang menghubungkan Pelabuhan Lianyungan di Provinsi Jingsu dengan Rotterdam di Eropa Barat; (2) *Tiongkok - Mongolia - Russia Corridor*; (3) *Tiongkok - Central Asia - West Asia Corridor*; (4) *Tiongkok - Indochina Peninsula Corridor*; (5) *Tiongkok - Pakistan Corridor*; dan (6) *Bangladesh - China - India - Myanmar (Corridor Tiongkok - Britian Bussinesh Council, tt.)*.

Dalam sudut pandang Tiongkok, BRI bukan hanya untuk Tiongkok tapi juga untuk dunia. Berulangkali Tiongkok meyakinkan masyarakat internasional bahwa kesuksesan BRI tidak hanya menguntungkan Tiongkok namun juga dunia. Walaupun berbagai pandangan muncul terkait dengan manfaat BRI namun Tiongkok tetap dalam pendiriannya bahwa melalui BRI dunia lebih baik tercipta. Cara berfikir inilah yang kemudian membuat Tiongkok sangat percaya diri untuk mengajak partisipasi negara-negara lain dalam mensukseskan BRI.

Salah satu tawaran menarik Tiongkok yang kemudian direspon secara positif oleh masyarakat global adalah mekanisme pendanaan BRI yang salah satunya melalui lembaga multilateral Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). AIIB yaitu bank pembangunan multilateral yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik. Diusulkan oleh Tiongkok pada tahun 2013 di launching pada Oktober 2014 dan berkantor pusat di Beijing. Memulai beroperasi pada bulan Januari 2016 dan pada tahun 2017 jumlah anggota telah berkembang menjadi 84 negara dari seluruh dunia.

PBB bahkan telah menyebut AIIB berpotensi meningkatkan pembiayaan pembangunan berkelanjutan (United Nation, 2015, 73). Sekedar sebagai pembandingan,

Asian Development Bank (ADB) memiliki basis modal atau uang yang dibayarkan dan dijamin oleh negara-negara anggota sedikitnya \$ 160 miliar sementara Bank Dunia memiliki \$ 223 miliar sedangkan AIIB mulai dengan modal \$ 50 miliar (The Economist explains: Why China is creating a new “World Bank” for Asia).

Sebagai inisiator BRI, Tiongkok menanggung beban lebih besar dari yang lain. Sehingga tidak heran bila China Development Bank (CDB), yakni Bank yang masuk dalam 3 terbesar milik pemerintah Tiongkok adalah sumber pendanaan lain bagi BRI. Dari CDB setidaknya sejak 2016 turun pinjaman sebesar 1 milyar hingga 110 milyar di akhir tahun (Wildau, Gabriel dan Nan Ma, 2017).

Implementasi BRI bisa dikatakan terintegrasi dan sinergis. Kepentingan nasional bangsa-bangsa yang terlibat dalam BRI terakomodir sehingga energi untuk mewujudkannya datang dari berbagai penjurur dan saling menguatkan satusama lain. Metode implementasi ini dilakukan dengan koordinasi intensif, membangun *trust* dan mengkonter wacana-wacana destruktif. Salah satu contoh menarik adalah bagaimana sinergitas kepentingan Tiongkok-Pakistan dalam Pelabuhan Gwadar yang diyakini kedua belah pihak merupakan hubungan “simbiosis mutualisme”.

### **Strategi Finansial China**

Sejak munculnya kebijakan terbuka (*open-door policy*), pemerintah Cina mulai memperluas jaringan dalam pasar saham internasional. Data menunjukkan bahwa Cina memiliki devisa terbesar ketujuh dalam pasar saham di dunia dan menjadi salah satu pusat perbankan internasional (Huang, 2006: 194). Perlibatan Cina ke dalam organisasi perdagangan dunia dan peningkatan kerjasama regional menunjukkan bahwa Cina mulai membuka diri terhadap globalisasi finansial.

Pada KTT G-20 pertama bulan November 2008, Cina memainkan peran kunci dalam memobilisasi para negara anggota. Pemerintah Cina menawarkan paket kebijakan

stimulus untuk menahan perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global. Pada tahun 2009 KTT G20 di London dan Pittsburg, pemerintah Cina membuat dua keputusan penting. Pertama, menambah fasilitas penyelamatan IMF dalam upaya mengatasi kebangkrutan beberapa negara di dunia, termasuk negara-negara Eropa dengan memberikan tambahan 500 miliar dolar kepada IMF. Selain itu, Cina membuat keputusan penting lainnya, yakni berkomitmen menyumbang 10% APBN dengan tujuan untuk membeli saham dalam bentuk obligasi IMF (Yafei, 2017), sebuah langkah serupa yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Marshall Plan kepada negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II untuk memperoleh posisi sebagai hegemon.

Strategi China menawarkan paket stimulus finansial pada akhirnya memengaruhi anggota G20 lainnya untuk merumuskan kebijakan yang serupa. Hasilnya pada saat KTT London, yakni target yang ditentukan sebelumnya ternyata melampaui kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya hingga mencapai 1,1 triliun dolar. Pemerintah Cina memanfaatkan G20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional dan untuk memperdalam peran pada tingkat pemerintahan global (Yafei, 2017). Ini sekaligus mengindikasikan bahwa pengaruh China relatif besar dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi internasional.

Selain itu, ambisi Cina untuk menjadi pemain utama dalam pasar keuangan ditunjukkan dengan upaya menjadikan Yuan sebagai nilai tukar perdagangan global. Pada KTT G-20 di London 2009, Cina secara terbuka menyalahkan AS dan kerangka peraturannya sebagai pemicu resesi ekonomi global dan menyerukan untuk menciptakan tatanan ekonomi dunia yang baru dengan cara mengganti dolar AS sebagai cadangan utama mata uang dunia (Zhang, 2009: 79). Kebijakan luar negeri Cina menuju pusran globalisasi finansial merupakan strategi dan respon Beijing untuk memperoleh capaian yang lebih besar dalam kontestasi ekonomi politik global guna mewujudkan kepentingan nasional.

### **Transisi Kekuasaan Politik Global**

Lompatan ekonomi, ekspansi pasar dunia, konsumsi energi yang meningkat, meluasnya investasi infrastruktur ke seluruh benua menjadi indikator yang meyakinkan tentang kebangkitan China tidak hanya secara ekonomi namun juga secara politik. Dari sudut pandang Amerika, fenomena kebangkitan China tentu mendapat perhatian khusus. Walaupun hubungan ekonomi dua negara besar tersebut terjalin erat sebagaimana terlihat dalam perdagangan dan ekonomi – setidaknya hingga perang dagang dikumandangkan Trump – namun saling curiga menjadi isu besar yang mewarnai interaksi kedua negara.

Konteks tersebut menuntun Amerika bersikap reaktif terhadap kebangkitan China. Perilaku Amerika terhadap Tiongkok, diarahkan untuk membendung meluasnya pengaruh global China. Membiarkan China tumbuh sama saja dengan mengakhiri posisi Amerika Serikat sebagai negara hegemon dalam ekonomi politik global. *Pivot to Asia* (2011) yang diawali oleh Obama merupakan strategi untuk memagari perluasan pengaruh Tiongkok di pasifik. Hal ini terlihat dengan upaya Amerika Serikat merapatkan hubungan dengan sekutunya di kawasan itu, seperti Jepang, Korea Selatan, Australia bahkan India. Termasuk diakhirinya embargo penjualan senjata AS ke Vietnam (2017) yang ditandai dengan import senjata Vietnam dari *paman sam* (SIPRI, Military Expenditure, 2019). Meningkatnya anggaran militer luar negeri AS di Asia Pasifik, hingga kebijakan proteksi (2018) yang memicu perang dagang.

Kebangkitan Tiongkok di satu sisi dan reaksi Amerika terhadapnya merupakan momen menarik yang menandai distribusi kekuasaan global baru. Bila trend kebangkitan Tiongkok di satu sisi dan kemerosotan pengaruh Amerika terus berlanjut, maka tidak dapat disangkal proses peralihan kekuasaan dunia terjadi. Walaupun sejak akhir Desember 2019, Covid telah menjadi isu baru yang berpotensi mengkaburkan proses pergeseran kekuasaan tersebut. Namun bila mencermati hubungan percepatan persebaran pandemik dengan derajat demokrasi suatu negara, maka Covid justru berpotensi mempercepat proses pergeseran tersebut. Fakta memberitahu bahwa Tiongkok memenangkan pertarungannya melawan pandemik, sementara di sisi lain negara-negara barat termasuk Italy, Spanyol,

Jerman, Prancis, Inggris, Swiss bahkan Amerika Serikat masih berjibaku mengatasi pandemik (WHO, <https://who.sprinklr.com/explorer>). Fakta tersebut menunjukkan dalam kasus penanganan pandemik negara non-demokratis memiliki metode yang lebih bisa diandalkan daripada negara demokrasi. Hal ini menjadi sebuah gambaran fenomena tentang erosi kekuatan negara demokratis dalam sistem internasional.

#### **D. PENUTUP**

Indikator penting dari kebangkitan Tiongkok adalah lompatan dan ekspansi ekonomi. BRI menjadi salah satu instrument penting untuk mendorong distribusi produksi yang tak terbandung. Namun menariknya BRI juga berlaku timbal balik, dimana negara lain juga dapat memafaatkan untuk melakukan ekspansi ekonomi. Konsekuensi penting dari kebangkitan ekonomi Tiongkok adalah meningkatnya kekuatan militer yang tentu memicu negara-negara lain, terutama saingan tradisonalnya, USA yang merespon secara agresif melalui kebijakan Pivot to Asia. Respon Amerika tersebut menjadi indikasi penting lain bahwa kebangkitan China tidak sekedar sesuatu namun lebih dari itu adalah faktor dalam politik global. USA sebagai negara hegemon sudah barang tentu sangat peka dengan pergerakan pertumbuhan power Tiongkok.

Artikel ini berfokus pada faktor dibalik kebangkitan Tiongkok. Faktor potensi pasar dan strategi negara memainkan peran penting dalam proses kebangkitan Tiongkok. Pasar yang luas baik di dalam maupun di luar negara menyerap aneka produk Tiongkok yang melimpah ruah. Namun demikian faktor pasar menjadi kurang berarti bila tidak diimbangi dengan strategi negara. BRI dan strategi finansial menjadi sangat penting dibalik partisipasi aktif negara dalam mengeksplorasi potensi pasar. Sehingga tidak mengherankan bila potensi pasar dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mendorong kebangkitan Tiongkok.

Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden USA namapaknya mengembalikan posisi tradisonal Amerika Serikat dalam politik global. Bila Trump membawa Amerika Serikat



menentang ideologi pasar bebas dan politik hegemoni yang dipromosikan secara konsisten oleh para pendahulunya. Biden nampaknya berupaya mengembalikan Amerika di atas jalan tradisionalnya lagi yang tentu meningkatkan ujian bagi kebangkitan China. Eksplorasi hubungan dua negara di era Biden menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya. Secara konseptual, gagasan Modelski menjadi penting untuk melihat bagaimana siklus transisi kekuasaan dunia dan kebangkitan dominasi Tiongkok dalam politik global.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arase, David (ed.), (2016), *China's Rise and Changing Order in East Asia*, Palgrave Macmillan, New York, pp. 8
- Banerjee, Dipankar (2016). "China's One Belt One Road Initiative – An Indian Perspective." *Perspective*. ISEAS. ISSUE: 2016 NO. 14.
- Belo, Walden (2019). *China: An Imperial Power in the Image of the West*. Thailand: Focus on the Global South.
- Bin, Sheng., (2015), *China's Trade Development Strategy and Trade Policy Reforms: Overview and Prospect*, The International Institute of Sustainable Development, Canada
- Boswell, Terry (1995). "Hegemony and Bifurcation Points in World History". *Journal of World-Systems Research*. Volume 1, Number 15. <http://jwsr.ucr.edu/>
- Cai, Kevin G., (2010), *The Politics of Economic Regionalism: Explaining Regional Economic Integration in East Asia*, palgrave MacMillan, New York
- Center in East Asia", dalam Park, Yung Chul, Ito, Takatoshi, Wang, Yunjong (eds), *A New Financial Market Structure in East Asia*, Edward Elgar Publishing, New York
- Choi, Ji Young, (2018) "Historical and Theoretical Perspectives on the Rise of China: Long Cycles, Power Transitions, and China's Ascent", *Asian Perspectives*, Volume 42, Number 1, January-March 2018, pp. 61-84.
- Covid-19, <https://who.sprinklr.com/>
- Deutsch, Karl W. and J. David Singer (1964), "Multipolar Power Systems and International Stability," *World Politics*, Vol. 16, No. 3.
- Dixon, James, (2013), "Korea's Embrace of Globalization", dalam [http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2013/05/348\\_91475.html](http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2013/05/348_91475.html)
- Elson, Anthony, (2013), *Globalization and Development: Why East Asia Surged Ahead and Latin America Fell Behind*, Palgrave Macmillan, New York

- Feenstra, Robert C. & Hamilton Gary G., (2006), *Emergent Economies, Divergent Paths: Economic Organization and International Trade in South Korea and Taiwan*, Cambridge University Press, UK
- Flint, Colin, (2006). *Introduction to Geopolitics*, Routledge, London & New York.
- Garret, Banning, (2011), “China Faces, Debates, The Contradiction of Globalization” dalam, *Journal of Asian Survey*, Vol. 41, No. 3, pp. 411
- Gilpin, Robert, (2001), *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, Princeton & Oxford University Press, UK & London
- Greenhalgh, T. and Rod Taylor (1997), “How to read a paper Papers that go beyond numbers (qualitative research),” *BMJ*, VOL. 315, 20 September.
- Harden, Blaine., “Japan’s Bloggers: Humble Giants of the Web.” *Washington Post*. December 6, 2007. [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/05/AR2007120502751\\_pf.html](http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/05/AR2007120502751_pf.html)
- Hart-Landsberg, Martin & Burkett, Paul, (2005), *China and Socialism: Market Reforms and Class Struggle*, Monthly Review Press, Canada
- He, Kai and Walker, Stephen (2015). “Role Bargaining Strategies for China’s Peaceful Rise”. *The Chinese Journal of International Politics*, 2015, 371–388 doi: 10.1093/cjip/pov009 Advance Access Publication.  
[http://stat.wto.org/CountryProfiles/JP\\_E.htm](http://stat.wto.org/CountryProfiles/JP_E.htm).
- Huang, Yiping, (2006), “Can Hong Kong Survive as an International Financial Centre”, dalam Park, Yung Chul, Ito, Takatoshi, Wang, Yunjong (eds)., *A New Financial Market Structure in East Asia*, Edward Elgar Publishing, New York
- Hungerland, Nils Hendrik, (2018), *Does the hegemonic stability theory explain the rise of China? Hegemonic Stability Theory versus International Regime Theory*, GRIN, Munich.
- IMF, (2018), *World Economic Outlook Database*, <https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending>
- Jiho, Shin, (2005), North Korea’s Response to the Globalization and Informatization Era, dalam [http://www.koreafocus.or.kr/design1/layout/content\\_print.asp?group\\_id=173](http://www.koreafocus.or.kr/design1/layout/content_print.asp?group_id=173)
- Katada, Saori N., (2009), *Political Economy of East Asian Regional Integration and Cooperation*, Japan, Asian Development Bank Institute, pp.2
- Kawasaki, Ichiro., (1969), *Japan Unmasked*, 1<sup>st</sup> Edition, Charless E. Tuttle Co., Inc, Tokyo
- Hart-Landsberg & Burkett, Paul (2006) China and the Dynamics of Transnational Accumulation: Causes and Consequences of Global Restructuring, *Historical Materialism*, 14(3): pp. 3-43)
- Lewis, James & Sesay, Amadu, (2002), *Korea and Globalization: Politics, Economics and Culture*, Routledge, London and New York: Routledge, pp. 245
- Li, Rex, (2008), *A Rising China and Security in East Asia*, Routledge, London & New York, pp. 114

- Li, Tan., Qiu, Larry., Xue., Ying, (2016) “Understanding China’s Foreign Trade Policy: A Literature Review” dalam *Front. Econ. China* 2016, Vol. 11 No. 3, pp. 410–438
- Mas’oed, Mohtar, (1998), *Merkantilisme dan Strukturalisme: Gagasan Anti-Liberal*, Fisipol UGM, Yogyakarta, pp. 13-16
- Mason, J. (2002). Linking qualitative and quantitative data analysis. In *Analyzing qualitative data* (pp. 103-124). Routledge.
- Modelski, G. (1987). *Long Cycles in World Politics*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2XS and London: Macmillan Press.
- Nufus, Hayati (2014). “Impian Tiongkok: Nasionalisme Tiongkok Melintas Batas Dalam Pembangunan Tiongkok”. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol: 11. No: 2. Desember.
- Ogawa, Eji, (2006), “Tokyo financial market as a financial
- Park, Sang-Chul, (2014), “South Korean Trade Strategies in the post Global Financial Crisis” dalam *Jurnal Contemporary Issues in Business and Government*, Vol. 20, No 1 (2014), pp. 60-61
- Pop, Adrian & Răzvan Grigoras, (2018) “Long Cycles: A Bridge Between Past and Futures”, *International Conference Paper on Future-Oriented Technology Analysis*.
- Rigger, Shelley, (2011) *Why Taiwan Matters – Small Island, Global Powerhouse*, Rowman & Littlefield Publishers 2011, pp. 59-94.
- Seung-soo, Han, (2016), “The Economic New Normal and China’s Financial Policy”, dalam <http://www.centralbanking.com/central-banking/feature/2473690/the-economic-new-normal-and-china-s-financial-policy>
- Söderbaum, Fredrik, (2003), *Theories of New Regionalism*, Palgrave Macmillan, New York
- Weil, Robert, (1996), *Red Cat, White Cat: China and the Contradictions of “Market Socialism”*, Monthly Review Press, USA
- Wildau, Gabriel dan Nan Ma (2017). “In charts: China’s Belt and Road Initiative.” *Financial Times*. 11 Mei 2017. <https://www.ft.com/content/18db2e80-3571-11e7-bce4-9023f8c0fd2e>
- WTO Statistics Database, "Trade Profiles: Japan". Dalam
- Yafei, He, (2017), China’s Foreign Policy in the New Era of Globalization, diperoleh dari: <http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/chinas-foreign-policy-in-the-new-era-of-globalization>
- Yoshimatsu, Hidetaka, (2008), *The Political Economy of Regionalism in East Asia*, Palgrave MacMillan, New York
- Zhang, Enyu, “From Adapting to Shaping: Contextualizing of the Practice of Regionalization in China’s Foreign Policy, dalam Kavalski, Emilian (ed), (2009), *China and the Global Politics of Regionalization*, MPG, United Kingdom
- Zhang, Yongjin (2016). “China and liberal hierarchies in global international society: power and negotiation for normative change”. *International Affairs*. 92: 4. P: 795–816.
- Zhang, Yunling, (2010), *China and Asian Regionalism*, World Scientific Publishing, Singapore

- “China's Foreign Trade” dalam *Government White Paper*, <http://www.china-embassy.org/eng/zt/bps/t943740.htm> , 2011/12/07
- “SIPRI Military Expenditure” <https://www.sipri.org/databases/milex>
- “The Silk Road Economic Belt and the 21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road.” Fung Business Intelligence Centre (2015). <https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/The%20Silk%20Road%20Economic%20Belt%20and%2021st%20Century%20Maritime%20Silk%20Road%20MAY%202015.pdf>
- Weil, Robert, (1996), *Red Cat, White Cat: China and the Contradictions of “Market Socialism”*, Monthly Review Press, USA.
- “Why China is creating a new “World Bank” for Asia.” *The Economist explains*, 11 November 2014, <https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/11/economist-explains-6>
- World Bank, (2018), *China Overview*, <https://www.worldbank.org/en/country/china/overview>
- “*World Economic Situation and Prospect 2015.*” *United Nation*. 2015. [https://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp\\_archive/2015wesp-ch3-en.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp-ch3-en.pdf)
- “Xi Jinping, Idola Baru Partai Komunis Cina.” *DW*. 24 Oktober 2017. <http://www.dw.com/id/xi-jinping-idola-baru-partai-komunis-cina/a-41083632>